

BELENGGU PENDIDIKAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN PENDIDIKAN DEMOKRATIS*

Oleh: MIF Baihaqi*

I ~ Prolog

Sejak membaca topik yang disodorkan oleh panitia, saya merenung cukup lama. Apa yang menarik? Yang menarik adalah kausalitas (hubungan sebab-akibat) yang disodorkan. Kata kunci pertama didalam topik adalah ‘belunggu pendidikan’ yang mengandung nilai negatif, terkungkung, tak bisa bergerak, yang menyiratkan ketidakberdayan. Dan, kata kunci kedua ‘mewujudkan pendidikan demokratis’ mengandung nilai positif, berharap, optimis, dan amat diidam-idamkan.

Kemudian saya berpikir lebih lanjut. Yang membelunggu, siapa? Yang terbelunggu, siapa? Lalu saya berandai-andai. Seandainya, yang membelunggu adalah pemerintah, maka pemerintah membelunggu dengan cara apa. Dengan kekuasaan? Undang-undang? Atau Peraturan Pemerintah? Maka yang dibelunggu adalah institusi/ lembaga pendidikan dalam bentuk sekolah-sekolah. Seandainya yang membelunggu adalah lembaga pendidikan, maka lembaga pendidikan jenis mana yang tega demikian? Guru-guru akan menjadi orang yang terbelunggu. Dan, seandainya guru-guru yang membelunggu pendidikan, maka alangkah kasihannya anak didik. Dia menjadi korban atas ulah guru-gurunya –yang ironisnya para guru itu pun juga punya anak di rumah, yang juga menjadi anak didik di sekolah.

Saya menjadi semakin terperanjat ketika panitia menyodorkan data yang cukup akurat mengenai ‘runtuhnya potret pendidikan’ di Jawa Barat. Berikut ini saya kutip ulang data-data itu.

- a. Setiap tahun masih ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah karena faktor geografi dan ekonomi. Anak *drop out* dari SD kelas 1, 2, dan 3 sekitar 200.000 sampai 300.000. Tentu, ini termasuk di Jawa Barat, yang juga banyak masyarakat terancam DO lantaran tidak memiliki biaya untuk melanjutkan sekolah. Data terbaru

* Disampaikan pada Seminar Pendidikan bertema “*Merajut Harapan Masa Depan Pendidikan yang Lebih Demokratis*” | Konferensi Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PII) XXIII Jawa Barat | Rabu, 27 Juni 2007 |

* Staf Pengajar Fakultas Ilmu Pendidikan UPI.

- yang dikemukakan Kepala Dinas Pendidikan Jabar, ada 153.639 anak usia 7-15 tahun tidak bersekolah.
- b. Di kota Cimahi, sekitar 7.000 siswa SD sampai SMA terancam *drop out*. Tidak dijelaskan secara rinci sebab dan alasannya.
 - c. Gambaran beberapa bangunan sekolah yang rusak:
 - Di kota Bandung ada 996 ruang kelas SD rusak.
 - Di kota Subang ada 764 SD rusak. Banyak anak terkena ancaman DO.
 - Di Kabupaten Bogor ada 215 murid SDN Cidokom I belajar di gubuk.
 - Di kota Sumedang ada 1.251 ruang SD rusak berat, 1.354 rusak ringan.
 - d. Ada yang lebih menyedihkan. Di Kabupaten Bandung terjadi penyunatan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan sebesar 11,4 miliar (Sumber: *Pikiran Rakyat* yang dikutip oleh panitia).

Pada makalah ini, saya mencoba mengurai sebisa mungkin, belenggu-belenggu apa yang kemungkinan ditemukan dan dirasakan di dunia pendidikan. Kadang terasa menyentuh wilayah persekolahan tetapi terasa pula diluar persekolahan. Kadang menyentuh siswanya, tapi mungkin juga gurunya. Pada tataran struktur dan perundang-undangan, saya pikir menjadi porsi pembicara lain.

II ~ Konotasi Belenggu

Dalam sebuah seminar di Yogyakarta, tahun 2000, pernah dilontarkan pertanyaan: Bagaimanakah model sekolah untuk masa depan? Manakah sekolah yang pas dan berguna untuk masa depan? Namun, pertanyaan yang demikian penting dan menyibukkan banyak orang untuk menjawabnya itu, ternyata dianggap 'tidak penting'.

Ada pertanyaan lain yang lebih menggigit, lebih tepat, dan lebih mendesak untuk dijawab. Yaitu: Adakah sesungguhnya masa depan buat sekolah?¹ Pertanyaan ini sungguh menyentak. Bagaimana jadinya, jika memang benar bahwa sekolah, yang biasa dianggap tempat menyiapkan masa depan, ternyata dia sendiri tidak mempunyai masa depan? Pertanyaan ini mungkin terlalu ekstrem dan mengada-ada, 'Masak sekolah tidak mempunyai masa depan?'

Jika kita mengaitkan dengan angka-angka drop-out yang dipaparkan *Pikiran Rakyat* dan penyunatan dana pendidikan di atas, memang pertanyaan ini menjadi

¹ Sabine Etzold: Thema Ohne Glanz, dalam *Die Zeit*, 1998, No 38.

penting. “Ngapain sekolah, wong sekolahnya ambruk!” Lalu, bagaimana menyandarkan masa depan anak pada sekolah yang diselenggarakan di gubuk? Apalagi dananya disunat.

Belenggu sekolah

Sejenak perlu kita mengingat gagasan Ivan Illich, sekitar 35 tahun lalu. Illich sudah mengingatkan akan perlunya kita melakukan “de-sekolah-isasi masyarakat”. Dia skeptis (ragu) akan kegunaan sekolah bagi hidup yang sesungguhnya dalam masyarakat. Dalam konteks lain, peringatan Illich itu kini menemukan kembali aktualitasnya. Sekarang ini, di tengah kemajuan teknik, ekonomi, informasi, dan zaman yang sudah global, sekolah bukanlah satu-satunya tempat belajar. Sekolah, demikian juga institusi pendidikan lain, dianggap kehilangan monopoli sebagai pengantar ilmu dan pendidik/pengajar. Untuk dapat bertahan hidup, di mana pun juga dan kapan juga, orang harus belajar terus-menerus. Ia harus bisa belajar di tempat kerjanya, di rumahnya, di mana saja, dan dalam hampir setiap langkah perjalanan hidupnya. Terlebih ia harus belajar ketika tempat dan pegangan yang dikiranya sudah mapan tiba-tiba goncang karena gangguan alam², karena pesatnya kemajuan dan mendadaknyanya perubahan³. Dalam keadaan demikian, apa yang diberikan sekolah terasa sudah tidak relevan, dan orang-orang tak dapat lagi mengandalkannya, kalau ia tidak ingin hidupnya macet ditinggalkan zaman⁴.

Gambaran sedih anak didik yang naas karena nasib sekolah tak hanya mulai terasa di Jawa Barat, di negeri maju pun hal demikian ada. Pakar pendidikan Prancis, Roger Fauroux, mencontohkan situasi di negaranya. Dulu, Prancis sangat bangga dengan sistem pendidikannya. Sekarang, berhadapan dengan kenyataan sosial yang ada, daya kekuatan sistem itu pudar. Menurut Fauroux, “makin lama makin berkuranglah pengaruh sekolah mengantarkan ilmu kepada murid-muridnya. Alasannya, bukan karena anak-anak zaman ini lemah secara intelektual untuk belajar pengetahuan, melainkan semata-mata karena mereka tidak memiliki kemauan dan tidak menginginkannya. Kini di kalangan anak muda ada gejala penolakan terhadap sekolah, justru sejauh berkaitan dengan problem-problem akut yang dihadapi mereka⁵.

² Misalnya gempa bumi di Yogyakarta, tsunami di Aceh, Banyuwangi, dan Pangandaran.

³ Misalnya pesatnya kemajuan teknologi komputer, *booming* internet, dan komunikasi yang *mobile*.

⁴ Sindhunata, *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*, Kanisius Yogyakarta, 2000, hal. 10.

⁵ Sindhunata, *op.cit.*, hal. 10.

Selama seabad lalu di Prancis, sekolah dengan mudah memenuhi tugasnya seperti diinginkan oleh masyarakat, yakni membentuk anak-anak muda dari lapisan mana pun menjadi *citoyens*, menjadi yang terpelajar. Sekarang, hal itu tak dapat terjadi lagi. Anak dari orang tua kelas menengah memang mempunyai kesempatan itu. Tapi anak kaum pekerja tetap menjadi anak pekerja. Anak kaum penganggur juga tetap menjadi anak penganggur. Semboyan “*Education for All*” atawa ‘pendidikan untuk semua’ sudah tak lagi menjadi kenyataan, dan siswa-siswa sendiri mengetahui hal itu. Pagi-pagi sekali banyak anak di Prancis sudah sadar bahwa mereka tak mempunyai masa depan.

Wajar saja jika belakangan ini banyak orangtua yang gandrung memilih dan meyakini ‘*homeschooling*’ sebagai alternatif. Mereka lebih memilih menyekolahkan anaknya di ‘Sekolah Alam’, ‘Sekolah Rumah’, ‘Sekolah Tanpa Sekat Sekolah’, dan sebagainya.

Belenggu informasi

Ada hal menarik lain di Jerman. Sekarang ini, wacana hidup manusia sudah dibuka lebar-lebar. Orang dihadapkan pada berbagai informasi, dari koran sampai tabloid, dari majalah sampai *newsletter*, dari buku teks sampai buku saku. Termasuk juga media elektronik yang mempercepat informasi itu, melalui radio-radio, TV swasta, hingga internet. Lalu, bagaimana orang harus menyikapi dan memanfaatkannya? Sebuah penelitian pendidikan di Jerman menyebutkan, ternyata orang makin sadar bahwa dirinya lemah dan tak berdaya (*Ibidem*) menghadapi berbagai informasi. Di satu sisi mereka senang mendapatkan informasi, tetapi disisi lain dia kewalahan membendung informasi. Di satu sisi mereka merasa telah banyak memiliki informasi, tetapi pada waktu yang sama dia juga sadar ternyata masih banyak informasi yang belum diketahuinya.

Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan –yang pernah didapati seseorang lewat pendidikan– ternyata tak dapat membantu apa-apa. Resep klasik yang berbunyi “Jika kamu mau sukses di masa depan, maka belajarlah di sekolah terkenal” rasanya sudah tak berlaku lagi. Sekarang ini, sekolah yang paling elit pun belum tentu mampu membekali murid-muridnya dengan pengetahuan dan pegangan yang memadai untuk menghadapi tantangan zaman ini. Sekolah dan ‘dilema banjirnya informasi’ juga bisa menjadi belenggu dari sisi tersendiri.

Belenggu guru

Sekiranya sekolah masih dianggap penting, tetapi di beberapa tempat, para guru sering diam-diam terjeblos ke dalam konservatisme pendidikan. Maklum, mereka telah menjadi ‘pegawai pendidikan’ di sekolah. Menghadapi tuntutan perubahan zaman yang semakin dahsyat, tak mungkin lagi bila para guru bermentalkan ‘pegawai pendidikan’, tetapi mereka harus menjadi pembelajar yang sejati. Kendati mereka sudah selesai masa pendidikannya di bangku universitas, kemudian sudah menjadi pengajar, namun para guru harus mau senantiasa belajar. Kalau tidak, mereka akan kedodoran mengikuti kemajuan murid-muridnya yang diam-diam belajar dengan caranya sendiri karena tersedianya demikian banyak sarana untuk menyerap pengetahuan di luar sekolahan.

Sesuai dengan tuntutan zaman, tak mungkinlah jabatan guru dijadikan sandaran karier sepanjang hidup, bila yang bersangkutan tidak mau berkarier sebagai pembelajar yang terus-menerus belajar sepanjang hidup. Sekolah dituntut untuk selalu melakukan ‘penyegaran’ bagi guru-gurunya. Para guru perlu maklum, konsep ilmu zaman sekarang sudah mengalami perubahan yang radikal. *Ilmu bukan hanya sesuatu yang dipelajari, tapi juga dilibati*. Artinya, ilmu tak dapat lagi disampaikan hanya dengan ‘diajarkan’ atau ‘pengajaran’, tetapi juga dengan ‘dialami’ atau ‘pengalaman’. Murid yang mengetahui sesuatu (dalam kajian ilmu) berarti masuk dan berpartisipasi ke dalam sesuatu itu, lalu mengorientasikan diri di dalamnya, mengakrabkan diri dengannya, baru kemudian menyatakan apa yang diketahuinya. Konsep klasik, “guru sebagai pengantara yang menyampaikan pengetahuan” sudah tidak mencukupi lagi. Mengajar bukan hanya mengantarkan pengetahuan pada siswa, tapi juga mengembangkan bakat siswa, membentuk kemampuannya untuk mengerti, menilai, dan menyimpulkan. Mengajar berarti juga memberikan bahan pengajaran yang dapat membantu siswa untuk mengembangkan fantasinya, empatinya, dan hasrat-hasratnya.

Belenggu kontrol

Ada hal lain yang juga perlu dicermati. Yaitu bila kita melihat jenjang kontrol yang diawaskan kepada sekolah. Misalnya: murid dikontrol guru. Guru dikontrol kepala sekolah. Kepala sekolah dikontrol dewan wali orangtua atau dikontrol lembaga yang lebih tinggi. Kata Sindhunata, kontrol mengontrol ini saling mengait dalam satu jaringan *njlimet*, ketat, dan sulit ditembus. Bisa dibayangkan, betapa rumitnya melak-

sanakan reformasi dan pembaruan dalam jaringan kontrol demikian⁶. Rasanya sulit dalam kesesakan jaringan kontrol itu sekolah mengekspresikan kebebasan dan spontanitasnya.

Yang juga menyedihkan, karena kelemahannya itu, sekolah beserta para guru sering menjadi ‘kambing hitam’ bagi banyak macam hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Misalnya begini: Jika kaum muda berpandangan terlalu sempit, sekolahlah yang salah karena tidak memberikan pelajaran sejarah yang luas. Jika kaum muda suka akan kekerasan, sekolahlah biangnya karena sekolah kurang menanamkan pendidikan nilai. Jika masyarakat merasa ketinggalan dalam teknologi, sekolahlah yang disalahkan karena terlalu malas dalam menekuni kemajuan. Jika anak-anak keranjingan televisi dan tergila-gila VCD, sekolah ikut bersalah karena tidak memberikan pendidikan media⁷.

Dilema memang. Banyak hal yang negatif dan buruk dialamatkan ke sekolah, padahal sikap demikian tidaklah benar. Tetapi mengapa banyak orang bersikap demikian terhadap sekolah? Karena sebagian di antara orang-orang ada yang tidak mau bertanggung jawab terhadap pendidikan. Dikiranya, pendidikan itu hanya tanggung jawab sekolah dan guru-guru, bukan tanggung jawab orangtua, politikus, pengusaha, dan anggota masyarakat lainnya. Sekolah lalu menjadi tempat curahan caci-maki bagi pelbagai kejelekan dan kekeliruan yang dilakukan masyarakat. Karena itu, sekolah pula yang harus menjadi tempat reparasi untuk memperbaiki kejelekan dan kekeliruan. Nah, lepas tanggung jawab macam inilah akhirnya membuat pendidikan kita merosot, remuk oleh caci-maki. Hal ini tidak boleh dibiarkan.

Pendidikan kita akan terjamin dan bermasa depan jika tanggung jawab pendidikan itu tidak dipikulkan melulu pada bahu sekolah. Pendidikan harus dikembalikan kepada masyarakat, dan anggota masyarakat ikut bersama-sama memikul tanggung jawab itu. Banyak ahli pendidikan optimis, bahwa tanggung jawab masyarakat atas pendidikan itu bakalan menjadi dasar dan modal bagi demokratisasi pendidikan, sejalan dengan telah berlakunya otonomi daerah. Dengan demikian, akan (dan sebagian malah sudah) terjadi perubahan paradigma, yang semula ‘paradigma sekolah sebagai penang-

⁶ Saya menjadi teringat mengenai kontrol mengontrol ini dalam sebuah pesantren besar di Jawa Tengah. Kakak Asuh menjadi pengontrol di ruang asrama. Karena kesalahan informasi, pengawas menjadi salah lapor. Karena laporan sudah terlanjur masuk ke Komisi Disiplin, susah dicabut lagi. Karena laporan sudah dibaca Pembina Asrama (Pak Kiai) lebih susah lagi diralat. Akhirnya santri menjadi korban ‘indisipliner’ di lingkungan asrama. Akibatnya, dia terkena *skorsing*. Yang lebih menyedihkan, santri pun menjadi keluar dari lingkungan persekolahan/pesantren.

⁷ Sindhunata, *opcit.*, hal.12

gung jawab pendidikan' menuju 'paradigma masyarakat sebagai penanggung jawabnya'.

Persoalannya: Golongan masyarakat yang mana yang bisa dan mampu berperan dalam pendidikan? Bukankah masyarakat Indonesia masih berlapis-lapis? Apalagi yang kaya semakin kaya, sedangkan yang miskin tetap miskin. Apakah dana BOS sudah cukup menyelesaikan masalah? Silakan direnungkan.

Belenggu kemiskinan dan dimiskinkan

Kira-kira tahun 2004 memasuki tahun ajaran baru, ada buku menggelitik berjudul *Orang Miskin Dilarang Sekolah*. Buku tulisan Eko Prasetyo itu bermula dari kegetiran dirinya ketika menuntun anak pertamanya –bernama Amartya, berusia 3 tahun– yang mau sekolah di Taman Kanak-kanak harus membayar uang pangkal sebesar Rp 2 juta. Lalu biaya bulanannya Rp 350.000 untuk biaya snack, pelajaran bermain, dan sesekali wisata di tempat hiburan. Kata Eko, “alangkah mahal bayaran untuk si kecil agar bisa bernyanyi, berdoa, dan mengetahui ejaan.”⁸

Eko terdiam dan pamit pulang. Dari satu sekolah ke sekolah lain, yang dibayangkannya adalah ‘apakah dia mampu menanggung biaya sebesar itu. Wong hanya mau menyekolahkan ke taman kanak-kanak saja, kok sudah dibenturkan oleh biaya. Ternyata Eko tidak sendirian. Tetangga sebelah rumahnya yang kebetulan tukang angkut pasir mengalami nasib yang sama. Mereka memiliki puteri berusia 5 tahun. Tiap pagi anak kecil itu hanya bisa menonton teman-temannya sekolah. Menyedihkan, karena dari sorot matanya tampak keinginan bahwa dia pun ingin seperti mereka.

Kalau dikaitkan dengan data, ada laporan dari Gerakan Anti-Pemiskinan Rakyat Indonesia (GAPRI). Disebutkan, sebelum krisis moneter, ada sekitar 20 juta warga Indonesia di bawah garis kemiskinan. Sesudah krisis, jumlah itu meningkat sampai dua kalinya⁹. Data Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Anak (UNICEF) menyatakan, 2-3 juta anak Indonesia akan disebut sebagai generasi yang hilang akibat kekurangan pangan, penyakit, dan tidak berpendidikan¹⁰. Tidak berpendidikan ini, pada kenyataannya, menjadi biang keladi tingginya angka kebodohan dan angka kematian. Padahal sejak zaman Orde Baru ada kebijakan pemerintah tentang wajib belajar, disusul zaman

⁸ Eko Prasetyo, *Orang Miskin Dilarang Sekolah*, Insist Press, Yogyakarta, 2004, hal.2.

⁹ Meskipun jumlah orang miskin berbeda-beda ditinjau dari pendefinisian, akan tetapi yang menarik di Indonesia –seperti yang dikatakan Direktur Regional Asia Pasifik Organisasi Perburuhan Internasional/ILO, Indonesia baik sebelum maupun setelah krisis jumlah orang miskinnya tetap. Lihat *Kompas* 2 Mei 2002.

¹⁰ Lihat *Kompas*, 17 Oktober 2003.

reformasi ada kebijakan dana bos. Tapi apa daya, banyak sekolah lebih memilih menggerakkan program dengan semangat berdagang. Jika sudah demikian, apakah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan dapat menyekolahkan anak-anaknya?

Laporan Pengembangan SDM Indonesia menyebut kalau jumlah orang miskin di Indonesia memang merosot dari 23% menjadi 18% antara 1999 dan 2002, namun antara 35-50% rakyat Indonesia terancam jatuh ke bawah garis kemiskinan¹¹.

Belunggu dana yang melangit

Betulkah hanya masyarakat miskin yang tidak bisa mengenyam pendidikan. Tidak!. Sekarang ini ada fenomena, meskipun ada anak pandai, tetapi kalau dia tidak berekonomi 'amat kuat' bisa-bisa dia tersingkir dari angan-angan sekolah di lembaga pendidikan yang baik. Pendidikan telah mematok biaya uang pangkal, atau biaya pengembangan lembaga, atau biaya pembangunan pendidikan yang tidak kecil.

Potret buruk mahalanya biaya pendidikan ini, merata untuk setiap jenjang pendidikan. Tak hanya di Taman Kanak-kanak, begitu pun di SD, SMP, SMA, sampai dengan pendidikan tinggi. Dalam pengalaman saya (dan teman-teman) yang akan menyekolahkan anak di SMP atau SMA, rata-rata harus mengeluarkan uang antara 3 sampai 4 juta untuk awal tahun ajaran. Sedangkan biaya bulannya antara 150.000 hingga 400.000.

Jika teman-teman Anda (yang sekarang masih duduk di SMA) akan masuk perguruan tinggi ternama, apalagi melalui jalur khusus, rentang biayanya beragam. Dana Pengembangan Lembaga dipatok cukup bervariasi, sesuai dengan program studi yang dipilihnya: Mulai dari yang 1,5 juta untuk masuk Prodi Pendidikan Taman Kanak-kanak atau Pendidikan Guru SD, bergerak ke angka 7 juta untuk program studi yang praktikumnya sederhana atau bersifat sosial, lalu ke angka 18 juta untuk program studi yang praktikumnya di laboratorium beneran, hingga ke angka 35 juta, 40 juta, 50 juta untuk program studi yang benar-benar bonafid, semisal kedokteran atau arsitektur. Nah, siapa mau antri?

¹¹ Eko Prasetyo, *Orang Miskin Tanpa Subsidi*. Resist Book, Yogyakarta, 2005, hal.23.

III ~ Pendidikan Demokratis

Pada bagian ini, saya tidak bisa bercerita banyak, mengingat terdesaknya waktu yang saya miliki ketika menuliskan makalah ini. Begitu banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan di kampus, sampai kadang-kadang saya merenung: Apakah saya berada di dalam lingkungan pendidikan yang demokratis?

Dari waktu ke waktu pekerjaan yang bersifat reguler harus diselesaikan, target demi target yang ditetapkan oleh lembaga harus segera dituntaskan, program demi program harus direalisasikan, anggaran demi anggaran harus diajukan dan dibuat SPJ-nya bergulir berulang-ulang.

Namun, saya meyakini bahwa pendidikan yang demokratis akan terwujud apabila semua elemen masyarakat diajak bicara untuk mewujudkannya. Pendidikan demokratis akan bisa diraih apabila para pelaku pendidikan mau berpihak kepada masyarakat kalangan bawah, tidak semata-mata melayani kalangan menengah ke atas. Dan, pendidikan demokratis akan terwujud apabila lembaga pendidikan tidak semata-mata berpikir 'industrialisasi pendidikan' atau 'berdagang', tetapi kembali kepada pemihakan nilai-nilai mencerdaskan kehidupan bangsa.

Karena itu, disertai permohonan maaf, saya lebih memilih untuk mendengar dan merespon persoalan-persoalan yang diajukan oleh audiens (peserta konferensi wilayah) mengenai pendidikan demokratis yang sedang diidam-idamkan ini. Selamat berseminar, selamat berdiskusi, dan selamat berkonferensi.

MIF Baihaqi

Jl. Pesantren, Bumi Prima R-20 Cibabat Cimahi 40513
Telp.022-6611344 ♦ 085220035242

Email: mifba@yahoo.com
mif@upi.edu

Sumber Bacaan:

- Prasetyo, Eko. (2005). *Orang Miskin Tanpa Subsidi*. Yogyakarta: Resist Book.
- Prasetyo, Eko. (2004). *Orang Miskin Dilarang Sekolah*. Yogyakarta: Insist Press.
- Rakhmat, Miftah F. [Editor]. (1997). *Catatan Kang Jalal: Visi Media, Politik, dan Pendidikan*. Bandung: Penerbit Rosda.
- Sindhunata. [Editor]. (2000). *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan: Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.